

VISI, MISI & SEJARAH KABUPATEN SUMBAWA

1.1. Visi dan Misi

Visi

Kabupaten Sumbawa merupakan Visi Bupati-Wakil Bupati terpilih Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Drs. H. Mohammad Ansori untuk periode tahun 2025-2030, yang menjadi Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul,
Maju dan Sejahtera”**

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- **UNGGUL** : **Unggul Sumberdayanya** (meliputi: Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya, Sumberdaya Pemerintahan dan Birokrasi, serta Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur), bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa menggunakan Sumberdaya yang Unggul (Keunggulan Komparatif atau Comparative Advantage) dan sekaligus menghasilkan Sumberdaya yang Unggul atau Berdaya Saing (Keunggulan Kompetitif atau Competitive Advantage). Keunggulan komparatif sumberdaya tersebut menjadi potensi/kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan, sementara keunggulan kompetitif sumberdaya tersebut menjadi syarat untuk mampu bersaing dengan produk/sumberdaya dari luar.
- **MAJU** : **Maju Perekonomiannya**, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk menghasilkan dan/atau mengembangkan Perekonomian yang Maju, ditandai oleh terjadinya diversifikasi dan peningkatan produktivitas



berbagai sektor ekonomi (terutama pertanian/agribisnis), tumbuhkembangnya ekonomi industri/agroindustri yang kreatif-inovatif, serta perdagangan/pemasaran produk yang terjamin.

- **SEJAHTERA**

Sejahtera Masyarakatnya, bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera lahir dan bathin, ditandai oleh tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang rendah, serta ketahanan pangan yang tinggi.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 tetap berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Keterkaitan Visi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Sumbawa

Misi merupakan *breakdown* atau penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan dengan tepat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi mengandung pengertian penggambaran yang ingin dicapai dan menjelaskan serta menguraikan Visi sebagai kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang akan dijalankan untuk pencapaian Visi tersebut dengan tepat.

Adapun Rumusan Misi untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Maju Unggul dan Sejahtera”, telah ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

MISI 1: SUMBERDAYA MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA UNGGUL

Melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan dan transformasi nilai-nilai sosial budaya ketenagakerjaan, kepemudaan dan perempuan sebagai pondasi dari daya saing daerah.

MISI 2: SUMBERDAYA PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI UNGGUL

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3: SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR UNGGUL

Melalui pengelolaan/penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

MISI 4: PEREKONOMIAN MAJU

melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pada pertanian/agribisnis dan industri/agroindustri dengan dukungan energy



sumberdaya mineral (pertambangan dan energi) dan pariwisata yang bernilai tambah dan berdaya saing.

MISI 5: MASYARAKAT SEJAHTERA

melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin (penanggulangan kemiskinan), mengurangi pengangguran dan kesenjangan, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Tabel 1. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	SUMBERDAYA MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA UNGGUL	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang unggul.2. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang unggul.3. Terwujudnya pengelolaan ketenagakerjaan, kepemudaan, perempuan, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang unggul.4. Terwujudnya pengelolaan nilai-nilai budaya dan keamanan yang unggul.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan SDM.2. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat/SDM.3. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kewirausahaan tenaga kerja, termasuk pekerja rentan.4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.5. Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)6. Meningkatnya nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.7. Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat.8. Meningkatnya pemajuan dan peran kebudayaan dalam pembangunan.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
2.	SUMBERDAYA PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI UNGGUL	1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional. 2. Terwujudnya pemerintahan dan reformasi birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN. 3. Terwujudnya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). 4. Terwujudnya perencanaan dan pengawasan pembangunan yang efektif, produktif dan berkelanjutan.	1. Meningkatnya kualitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bertugas. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). 5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah. 7. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. 8. Meningkatnya kualitas, efektivitas dan kebermanfaatan pengawasan pembangunan.
3.	SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR UNGGUL	1. Terwujudnya pengelolaan penataan ruang dan Kawasan Sentra Produksi (KSP) sesuai keunggulan komparatifnya. 2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan (darat/lahan, udara, air/laut) dan persampahan yang aman, nyaman dan berkelanjutan. 3. Tersedianya konektivitas antarwilayah dan	1. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 2. Meningkatnya daya dukung dan produktivitas Kawasan Sentra Produksi (KSP). 3. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan (darat/lahan, udara, air/laut). 4. Meningkatnya pengelolaan



No	Misi	Tujuan	Sasaran
		infrastruktur wilayah sesuai kebutuhan sektor/aktivitas unggulan.	<p>persampahan yang aman dan terkendali.</p> <p>5. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.</p> <p>6. Meningkatnya pembangunan dan/atau pemanfaatan infrastruktur wilayah.</p> <p>7. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana.</p>
4.	PEREKONOMIAN MAJU	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan agribisnis/pertanian dalam arti luas (tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanankelautan) yang produktif dan berkualitas.</p> <p>2. Terwujudnya pengelolaan industri/agroindustri produk unggulan.</p> <p>3. Terwujudnya investasi atau penanaman modal yang produktif dan solutif terhadap ekonomi wilayah.</p>	<p>1. Meningkatnya produksi/produktivitas agribisnis/pertanian dalam arti luas (tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan-kelautan).</p> <p>2. Meningkatnya industri/agroindustri produk unggulan yang berdaya saing.</p> <p>3. Meningkatnya investasi atau penanaman modal yang produktif (kerjasama pemerintah dan dunia usaha).</p> <p>4. Meningkatnya aktivitas energi sumberdaya mineral (pertambangan dan energi) dan pariwisata yang mendukung pertanian/agribisnis dan industri/agroindustri.</p> <p>5. Meningkatnya perdagangan produk unggulan di pasar lokal, regional dan nasional.</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran
5.	MASYARAKAT SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penurunan tingkat kemiskinan penduduk, termasuk kemiskinan ekstrim. 2. Terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 3. Terwujudnya pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi bagi penduduk miskin. 2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan. 3. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok. 4. Meningkatnya Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen IPM. 5. Menurunnya jumlah pengangguran terbuka.



BUPATI SUMBAWA

Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P



WAKIL BUPATI SUMBAWA

Drs. H. MOHAMMAD ANSORI

Gambar 1. 2 Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2025-2029

1.2. Sejarah Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa sebelum menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berkembang dari cikal bakal wilayah Kesultanan

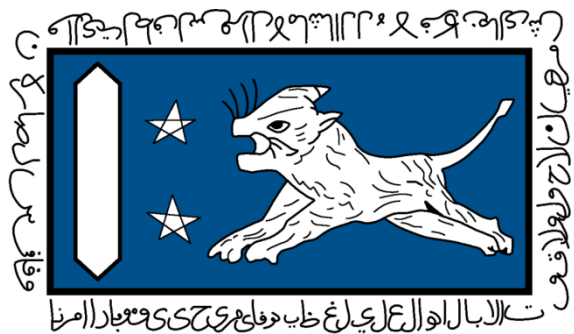


Samawa. Kesultanan Samawa merupakan kumpulan dari berbagai kerajaan kecil yang tersebar dari Jereweh hingga Empang, dimulai dari bagian barat Sumbawa terdapat kerajaan Utan, Taliwang, Seran (Seteluk), Jereweh yang sekarang telah menjadi bagian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga Selaparang di Pulau Lombok.

Sejak penaklukan Gowa atas Sumbawa pada tahun 1618, kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Sumbawa bagian barat berhasil dipersatukan menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Sumbawa. Kerajaan Sumbawa terdiri dari kerajaan itu sendiri dan tiga daerah taklukannya, yaitu Taliwang, Jereweh, dan Seran. Ketiga kerajaan taklukan ini memiliki kedudukan yang sederajat, dan karena itu dikenal dengan sebutan *Kamutar Telu (de drie Kamutarlanden)*. Penaklukan Gowa atas Selaparang pada tahun 1640 mengakibatkan Kerajaan Selaparang disatukan dengan Kerajaan Sumbawa. Sejak itulah Kerajaan Sumbawa membawahi empat kerajaan: Jereweh, Taliwang, Seran, dan Selaparang (di pulau Lombok), atau dikenal dengan Kamutar Empat (*de vier Kamutarlanden*).

Kesultanan Sumbawa, berdiri resmi tanggal 30 November 1648. Wilayahnya dari Empang sampai Jereweh. Sebelum berdiri Kesultanan Sumbawa, terdapat beberapa kerajaan/kedatuan-kedatuan, yang tersebar dipelbagai wilayah. Wilayah tengah dan selatan, misalnya

terdapat Kerajaan Dewa Mas Kuning di Selessek (Ropang), Kerajaan Datu Naga di Petonang (Ropang), Kerajaan Ai Renung (Moyo Hulu), Kerajaan Dewa Awan Kuning di Sampar Semulan (Moyo Hulu), Kerajaan Perumpak di dekat Pernek (Moyo Hulu), Kerajaan Gunung Setia (Sumbawa) dan Kerajaan Gunung Galesa (Moyo Hilir). Kemudian sebelah timur terdapat Kerajaan Tangko (Empang), Kolong (Plampang), Kerajaan Ngali (Lape) dan Kerajaan Dongan (Lape). Sebelah Barat ada Kerajaan Hutan (Utan), Kerajaan Seran (Seteluk), Kerajaan



Gambar 1. 3 Bendera Kerajaan Sumbawa

Taliwang, Kerajaan Jereweh dan Kerajaan Selaparang (Lombok). Akan tetapi sejak Kesultanan terbentuk, maka semua kerajaan/kedatuan-kedatuan tersebut melebur dan bersatu di bawah payung Kesultanan Sumbawa.

Dalam pembagian daerah kekuasaan Belanda, kerajaan Sumbawa menjadi wilayah *Gubernemen Selebes* dan kepulauannya. Selanjutnya, menurut pembagian wilayah Karesidenan Timor, Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba merupakan sebuah *afdeeling* dengan Sumbawa Besar sebagai ibukotanya. Khusus untuk Kerajaan Sumbawa dibagi ke dalam dua wilayah *onderafdeeling*, yaitu *onderafdeeling* Sumbawa Barat yang wilayahnya meliputi Jereweh hingga Rhee dan *onderafdeeling* Sumbawa Timur. Pola pemerintahan hasil pengenalan pemerintahan Hindia Belanda dijabarkan secara hirarkhis-struktural, dari sistem *Onderafdeeling* yang dibagi dalam beberapa daerah administratif. Beberapa kampung digabung menjadi satu lingkungan kekuasaan yang merupakan *Onderdistrict*, dan beberapa *onderdistrict* digabung menjadi satu *district*, sehingga dengan demikian dijumpai *district-district* dalam wilayah kekuasaan kerajaan Sumbawa sebagai berikut :

- a. *District* Punu-Kika, yang meliputi *onderdistrict-onderdistrict*: Empang (Punu) dan Plampang, Lape/Lopok (Kika).
- b. *District* Sumbawa Tengah dan Orong Telu, meliputi *onderdistrict* Brang Rea Hilir (Sumbawa Besar), Brang Rea Hulu (PeraU), Moyo Hilir, Moyo hulu, Ropang, Lunyuk, dan Batu Lanteh.
- c. *District* Alas meliputi *onderdistrict*: Utan, Buer, Alas, dan Mapin.
- d. *District* Taliwang yang meliputi *onderdistrict*: Seteluk, Taliwang, dan Jereweh.

Penggabungan *onderdistrict* tidak bertahan lama kemudian dihapus, *onderdistrict* yang tersisa kemudian berubah menjadi kedemungan (kecamatan). Perubahan struktur pemerintahan ini telah berdampak pula pada perubahan atau penghapusan terhadap konsep Kamutar Telu: Jereweh, Taliwang, dan Seran. Selanjutnya secara ringkas masa kekuasaan Kesultanan Sumbawa dijabarkan sebagai berikut.



- Tahun 1648 s.d 1668 : Dewa Mas Cini
- Tahun 1668 s.d 1674 : Dewa Mas Gowa
- Tahun 1674 s.d 1702 : Dewa Mas Bantan Dewa Dalam Bawa
- Tahun 1702 s.d 1725 : Dewa Mas Madinah Muharram Harun Al Rasyid I
- Tahun 1722 s.d 1725 : Riwayat Datu Bala Sawo Dewa Lengit Leng Sampar
- Tahun 1725 s.d 1731 : Dewa Masmawa Sultan Djalaluddin Dewa Mas Muhammadsyah I Dewa Leng Gunung Setia
- Tahun 1731 s.d 1759 : Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin I (Dewa Mas Meppasusung Datu Poro)
- Tahun 1759 s.d 1760 : Dewa Masmawa Sultanah Siti Aisyah (I Sugiratu Karaeng Bontoparang)
- Tahun 1760 s.d 1761 : Dewa Masmawa Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin
- Tahun 1761 s.d 1764 : Dewa Masmawa Sultan Muhammad Djalaluddinsyah II (Gusti Mesir Abdurrahman Pangeran Anom Mangkuningrat)
- Tahun 1764 : Dewa Masmawa Sultan Mahmud
- Tahun 1764 s.d 1775 : Riwayat Dewa Mas Meppacong Mustafa
- Tahun 1775 s.d 1777 : Riwayat Datu Busing Lalu Komak
- Tahun 1777 s.d 1790 : Dewa Masmawa Sultan Harunnurrasyid II
- Tahun 1790 s.d 1795 : Dewa Masmawa Sultanah Shafiatuddin
- Tahun 1795 s.d 1816 : Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II (Lalu Muhammad Datu Bau Balo)
- Tahun 1816 s.d 1825 : Riwayat Nene Ranga Lalu Dilaga Mele Manyurang
- Tahun 1825 s.d 1836 : Riwayat Nene Ranga Lalu Manyurang Mele Abdullah
- Tahun 1836 : Riwayat Nene Kalibelah Lalu Padusung Dea Pin Mandesingi
- Tahun 1836 s.d 1837 : Dewa Masmawa Sultan Lalu Muhammad Mesir
- Tahun 1837 s.d 1883 : Dewa Masmawa Sultan Amrullah
- Tahun 1883 s.d 1931 : Dewa Masmawa Sultan Muhammad Djalaluddinsyah III
- Tahun 1931 s.d 1958 : Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III
- Tahun 2011 – Sekarang : Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV

Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddinsyah III (1883 – 1931) dibangun Istana Dalam Loka. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Istana ini dibangun pada tahun 1885 secara gotong royong oleh masyarakat Sumbawa. Tukang-tukang didatangkan dari seluruh wilayah kerajaan dipimpin oleh Imam Haji Hasyim. Dalam Loka berdiri di atas lahan seluas 8.239 m², sedangkan luas bangunannya 904 m². Didirikan di atas tiang yang berjumlah 99 buah (rumah panggung) dan berlantai dua, bahan dasar bangunan ini adalah kayu jati dan beratap sirap.

Istana Dalam Loka bukanlah satu-satunya bangunan istana yang pernah berdiri di lokasi tersebut, karena di tempat yang sama sebelumnya telah dibangun sejumlah bangunan istana kerajaan Sumbawa antara lain Istana Bala Balong, Istana Gunung Setia dan Istana Bala Sawo. Kini Istana Dalam Loka menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mengembangkan pariwisata sejarah. Setelah wafat pada tahun 1931, kekuasaan raja turun kepada putra mahkota yang mendapat gelar Sultan Muhammad Kaharuddin III. Pada zaman pemerintahannya inilah menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang.

Kesultanan Sumbawa telah memainkan peran penting dalam tata pemerintahan di Pulau Sumbawa, paling tidak selama 1945 - 1957. Tentara Sekutu menginjakkan kakinya di Pulau Sumbawa pada



Gambar 1. 4 Istana Dalam Loka

tanggal 12 Januari 1946, kemudian menyusun pemerintahannya di Pulau Sumbawa. Kesultanan Sumbawa dan Bima diatur dalam satu ikatan yang dinamakan Federasi Pulau Sumbawa dalam lingkungan Karesidenan Timor. Federasi ini dibentuk di Sumbawa Besar pada tanggal 27 Februari 1947 dan



pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa ini dijalankan oleh Dewan Raja-raja federasi tersebut. Selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Swapraja. Dewan ini bertugas memberi nasehat.

Pada tanggal 14 Desember 1948 Sultan Sumbawa menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan monopoli atas candu dan garam. Tanggal 1 Januari 1949 Dewan-dewan Kerajaan dan Dewan Pulau Sumbawa diganti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pulau Sumbawa dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setempat (swapraja). Pada tanggal 26 Maret 1949 *Assisten Resident* menyerahkan kekuasaan kepada Ketua Dewan Raja-raja Muhammad Salahuddin, Sultan Bima. Penyerahan tersebut dilakukan di Sumbawa Besar yang disaksikan oleh Mr. S. Binol, Menteri Sosial NIT atas nama Menteri Dalam Negeri NIT (periksa Sejarah Nusa Tenggara Barat, 1997). Kemudian Pemerintah Indonesia Timur berdasarkan Undang – undang Nomor 44 tahun 1949 membentuk Daerah Statuta Federasi Pulau Sumbawa, yang ditetapkan oleh Dewan Raja – Raja pada tanggal 6 September 1949.

Perubahan sistem Pemerintahan terjadi lagi dengan terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang didasarkan pada Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958. Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Khusus Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menjadi enam Daerah Swatantra Tingkat II, dimana raja sekaligus menjadi Kepala Pemerintahan. Karena itu otomatis Federasi Pulau dibubarkan. Federasi Pulau Lombok dibubarkan pada tanggal 17 Desember 1958 dan tanggal tersebut hingga sekarang dijadikan sebagai hari lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Federasi Pulau Sumbawa dibubarkan pada tanggal 22 Januari 1959 dan pada saat itu dilantiklah Sultan Muhammad Kaharuddin III menjadi Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa. Oleh



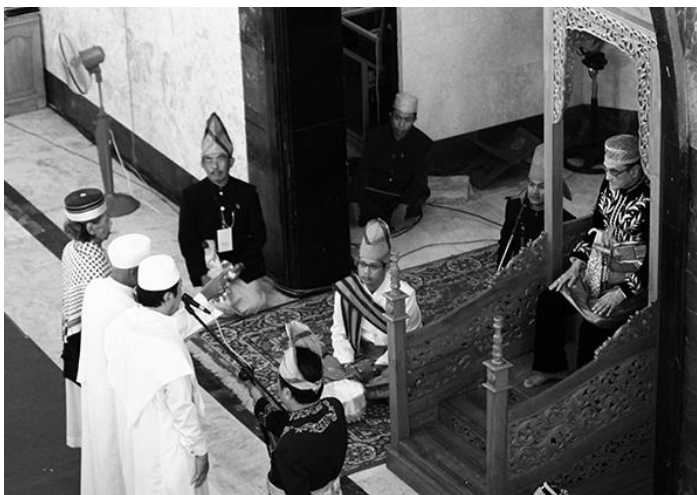
karena itu saat dibubarkannya Federasi Pulau Sumbawa dan diangkat / dilantiknya Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa, dijadikan sebagai hari lahirnya Kabupaten Sumbawa.

Sejarah panjang proses transformasi pemerintahan di Kabupaten Sumbawa tersebut membawa implikasi pada terbentuknya kultur masyarakat yang terus berimplikasi pada kultur birokrasi dalam kehidupan modern masyarakat Kabupaten Sumbawa yang sangat taat terhadap kepemimpinan formal. Setelah melewati masa revolusi perjuangan kemerdekaan NKRI, Kabupaten Sumbawa terus berkembang baik dari segi administrasi pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Kabupaten Sumbawa dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bersama 5 (lima) Daerah Tingkat II lainnya dalam Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Daerah Tingkat II Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima.

Pada saat pembentukannya, Kabupaten Sumbawa terdiri dari 14 kecamatan yaitu Kecamatan Empang, Plampang, Lape-Lopok, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Ropang, Lunyuk, Sumbawa, Batu Lanteh, Utan Rhee, Alas, Seteluk, Taliwang, dan Jereweh. Dalam perkembangan selanjutnya pada saat implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, telah dibentuk lima kecamatan baru sebagai hasil pemekaran yaitu Kecamatan Sekongkang (pemekaran Kecamatan Jereweh), Kecamatan Brang Rea (pemekaran Kecamatan Taliwang), Kecamatan Alas Barat (pemekaran Kecamatan Alas), Kecamatan Labangka (pemekaran Kecamatan Plampang) dan Kecamatan Labuhan Badas (pemekaran Kecamatan Sumbawa). Dan pada tahun 2003, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Tahun 2003 telah dibentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Buer (Pemekaran Kecamatan Alas), Kecamatan Rhee (Pemekaran Kecamatan Utan Rhee), Kecamatan Unter Iwes (Pemekaran Kecamatan Sumbawa), Kecamatan Moyo Utara (Pemekaran

Kecamatan Moyo Hilir), Kecamatan Maronge (Pemekaran Kecamatan Plampang), Kecamatan Tarano (Pemekaran Kecamatan Empang). Pada tahun 2003, lima kecamatan paling barat yaitu Kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea dan Seteluk dimekarkan menjadi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003.

Pembentukan KSB mengurangi jumlah Kabupaten Sumbawa yang semula 24 kecamatan menjadi 19 kecamatan, dan pada Tahun 2005 dibentuk dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Orong Telu (pemekaran Kecamatan Lunyuk) dan Kecamatan Lopok (pemekaran Kecamatan Lape Lopok). Dan pada tahun 2007 berdasarkan Perda Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2007, Kecamatan Ropang dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Ropang, Lenangguar dan Lantung. Sehingga sejak awal tahun 2008 Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan serta 8 kelurahan dan 157 desa.



Gambar 1. 5 Penobatan Sultan Muhammad Kaharuddin III

Tanggal 5 April 2011 merupakan momentum bersejarah bagi peradaban dan perjalanan sejarah bagi Tana dan Tau samawa, karena pada tanggal tersebut melalui *Mudzakara Rea* Lembaga Adat Tana

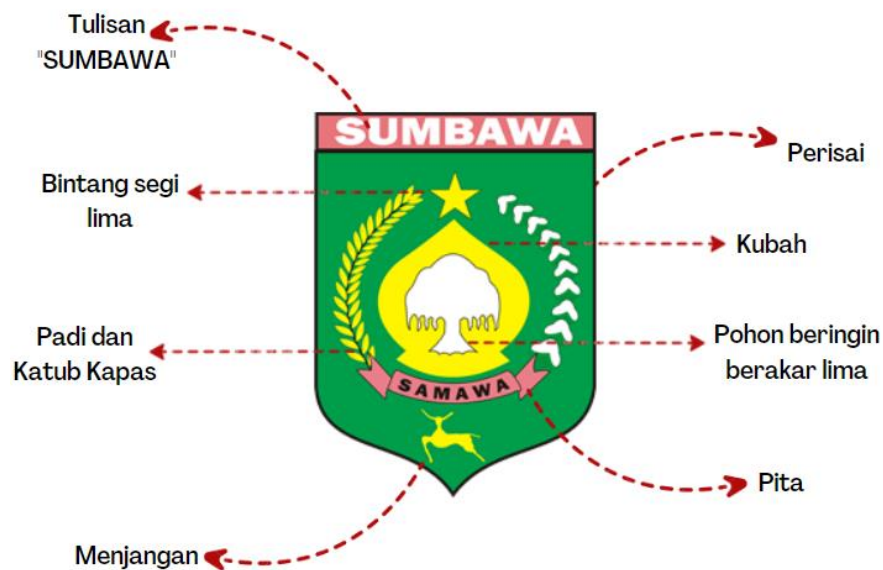
Samawa (LATS) putra mahkota Sultan Muhammad Kaharuddin III, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin, dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa ke-18 dengan gelar Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Penobatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 80 tahun setelah penobatan Sultan Kaharuddin III. Dengan penobatan Sultan Kaharuddin IV sebagai Puin Rea Adat diharapkan dapat menjadi pengayom dan pelindung serta panutan bagi rakyat Sumbawa.

Upacara penobatan yang dihadiri oleh seluruh raja dan sultan yang berada di wilayah Indonesia Bagian Timur dan tokoh adat yang ada di Nusa



Tenggara Barat ini diawali dengan proses Basiram, dimana Sultan Sumbawa melakukan ritual mandi suci di Istana Bala Kuning yang dilanjutkan dengan sesalin Pengkenang, yaitu Sultan mengenakan pakaian kebesarannya tanpa mahkota. Selanjutnya Sultan diiringi oleh permaisuri Andi Tendri Djadjah Burhanuddin beserta para tokoh adat menuju Istana Dalam Loka. Penobatan ini dimeriahkan dengan pagelaran kesenian rakyat sekaligus menjadi pesta rakyat selama tiga hari tiga malam yang dipusatkan di Istana Dalam Loka dengan menggelar berbagai kesenian seperti Ratib Rabana Ode, Ngumang, Balawas, Sekeco, Malangko, Main Iwak, Badempa, Karaci dan kesenian rakyat lainnya. Penobatan ini menjadi simbol bahwa meskipun Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat berpisah dalam hal administratif namun dari sisi sejarah bersatu dibawah naungan Kerajaan Sumbawa.

1.3. Lambang Daerah Kabupaten Sumbawa



Gambar 1. 6 Lambang Daerah Kabupaten Sumbawa

Arti dari masing-masing lambang adalah sebagai berikut:

- *Tulisan yang berbunyi "SUMBAWA"* adalah nama Daerah Kabupaten Sumbawa yang berpemerintahan sendiri (otonom).
- *Bintang segi lima*, melambangkan rasa Ketuhanan Yang Maha Esa dari masyarakat Kabupaten Sumbawa.



- *Padi dan Katub Kapas*, melambangkan Struktur Pemerintah Wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.
- *Perisai berbentuk seperti Perisai Pancasila*, mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan serta menggambarkan jiwa kepahlawanan yang berdasarkan Pancasila sebagai kepribadian asli Bangsa Indonesia.
- *Menjangan*, menggambarkan Binatang (Fauna) spesifik yang terindah di Daerah Kabupaten Sumbawa dan melambangkan keterampilan/ketangkasan dalam gerak pembangunan.
- *Kubah*, melambangkan pandangan hidup keagamaan dari penduduk Kabupaten Sumbawa yang teguh, patuh serta taat melaksanakan Perintah Agamanya.
- *Pita bertuliskan "Samawa"* mengungkapkan nama asli Kabupaten Sumbawa
- *Pohon beringin berakar lima*, mengambil pengertian dari tambo penduduk Sumbawa yang melukiskan proses sejarah kebudayaan penduduk suku Sumbawa, Taliwang dan Serang yang berpusat di Sumbawa Besar serta mewujudkan keunikan dan percampuran daerah suku Sumbawa asli dengan Mojopahit, Bugis, Makasar dan Banjar yang diwujudkan dalam akar lima.

Motto Daerah Kabupaten Sumbawa adalah "SABALONG SAMALEWA" yang artinya Membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik material dengan pembangunan mental spiritual (Dunia dan Akhirat). Sasanti Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu "B E S A R" merupakan singkatan dari BERSIH, ELOK, SEHAT, AMAN, DAN RAPI.

1.4. Metodologi

Lingkup penyusunan profil Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 meliputi koordinasi bersama SKPD se-Kabupaten Sumbawa mengenai kebutuhan data, pengumpulan data, survey data, evaluasi data, kompilasi data, analisis data serta pencetakan dokumen Profil Daerah Kabupaten Sumbawa 2021.

1.5. Kompilasi Data

Kompilasi data merupakan salah satu tahapan proses seleksi data, tabulasi data dan pengelompokan data sesuai kebutuhan. Diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Profil Daerah Kabupaten Sumbawa yang sistematis dan dilengkapi dengan tabel-tabel, angka-angka, diagram-



diagram, gambar-gambar dan peta. Adapun jenis sistematika yang disajikan dalam dokumen Profil Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

- A. Visi Misi dan Sejarah Kabupaten Sumbawa
- B. Data Umum Daerah
- C. Data Sosial Budaya
- D. Data Sumber Daya Alam
- E. Data Infrastruktur
- F. Data Ekonomi dan Keuangan
- G. Data Politik, Hukum dan Keamanan